

Published every February and August

p-ISSN 2443-2776

e-ISSN 2657-0491



Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia

ASIFA NURFADILAH, AGUS MULYANA & ANDI SUWIRTA

Peranan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 1934-1953

ABSTRAKSI: Artikel ini – dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode historis, dan studi literatur – mengkaji tentang upaya pembaharuan pendidikan Islam di sebuah Pesantren oleh seorang tokoh Kyai Haji. Tokoh tersebut bernama Abdul Wahid Hasyim, dimana ia mengusulkan kepada ayahandanya, K.H. (Kyai Haji) Hasyim Asy'ari, untuk melakukan pembaharuan dalam hal metode pengajaran dan cakupan materi ajar di Pesantren Tebuireng. Beberapa usulan itu, pada awalnya, ternyata mendapat penolakan, baik dari masyarakat, ulama, bahkan dari ayahandanya sendiri. Tetapi, kemudian, ide-ide pembaharuan Abdul Wahid Hasyim ada pula yang diterima dan diterapkan di Pesantren Tebuireng, salah satunya dengan mendirikan Madrasah Nizamiyah pada tahun 1934. Adapun aspek-aspek pendidikan Islam yang diperbaharui oleh Abdul Wahid Hasyim, diantaranya, adalah: (1) Tujuan Pendidikan untuk membentuk Santri yang bertakwa dan berwawasan luas; (2) Kurikulum atau “Leerplan” dengan dimasukkannya berbagai materi ajar non-agama Islam, seperti Sains, Matematika, Bahasa Inggris, dan Belanda; serta (3) Metode Pengajaran untuk membentuk daya kritis dan inisiatif para Santri di Pesantren.

KATA KUNCI: Peranan Kyai Haji; Pembaharuan Pendidikan Islam; Pesantren Tebu Ireng; Madrasah Nizamiyah.

ABSTRACT: “The Role of K.H. Abdul Wahid Hasyim in Reforming Islamic Education in the Tebuireng Islamic Boarding School, Jombang, East Java, Indonesia, 1934-1953”. This article – using the qualitative approach, historical method, and literature review – examines the efforts to renewal Islamic education in an Islamic boarding school by a prominent of Islamic clerics. The figure is named Abdul Wahid Hasyim, where he proposed to his father, K.H. (Kyai Haji) Hasyim Asy'ari, to make updates on teaching methods and the scope of teaching materials in the Tebuireng Islamic boarding school. However, some of his proposals turned out to be rejected, both from the community, clerics, even by his father own-self. But, then, Abdul Wahid Hasyim's ideas were accepted and applied in the Tebuireng Islamic boarding school, one of which was the establishment of the Nizamiyah Islamic modern school or “Madrasah” in 1934. The aspects of Islamic education that were renewed by Abdul Wahid Hasyim included: (1) Purpose of Education is to form students who are cautious and broadminded; (2) Curriculum or “Leerplan” with inclusion of variety of non-religious teaching materials, suah as Science, Math, English, and Dutch languages; and (3) Tutorial Teaching Methods to form critical power and students initiatives in Islamic boarding school.

KEY WORD: The Role of Clerics; Islamic Education Renewal; Tebuireng Islamic Boarding School; Nizamiyah Islamic Modern School.

About the Authors: Asifa Nurfadilah, S.Pd. adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Dr. Agus Mulyana dan Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, Penulis bisa dihubungi melalui alamat emel: asifanurfadilah21@student.upi.edu dan suciandi@upi.edu

Suggested Citation: Nurfadilah, Asifa, Agus Mulyana & Andi Suwirta. (2020). “Peranan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 1934-1953” in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, Volume 5(1), February, pp.19-42. Bandung, West Java, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, with ISSN 2443-1776 (print) and ISSN 2657-0491 (online).

Article Timeline: Accepted (November 10, 2019); Revised (December 14, 2019); and Published (February 28, 2020).

PENDAHULUAN

Masa kebangkitan Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi kemunduran dalam berbagai bidang, yang dialami umat Islam di Indonesia. Gambaran tentang kemunduran Islam di Indonesia sangatlah kompleks. Islam yang masuk ke Indonesia tidak begitu kreatif lagi di bidang ilmu, lebih-lebih di bidang politik sudah mulai agak melemah. Gambaran kemunduran Islam bila diteruskan sampai abad ke-19, maka kelemahan Islam di Indonesia tidak disebabkan dari segi perkembangan ilmu saja, akan tetapi juga disebabkan oleh kemunduran Islam secara internasional (Steenbrink, 1984:5; Tampubolon, 2014; dan Mustafa, 2019).

Sistem pendidikan dualisme yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, serta kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang tidak berpihak terhadap pendidikan Islam, memberikan andil dalam kurang berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini diperparah dengan sikap dualisme umat Islam sendiri terhadap ilmu dan model pesantren, yang tidak mengalami pengembangan sistem pendidikan sampai menjelang abad ke-20. Orientasi pendidikan yang hanya berkonsentarsi pada urusan Akhirat merupakan salah satu penyebab tertinggalnya kaum Muslim dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya (Damami, 2000:53-54; Bisri, 2011:163; dan Kurniyati, 2018).

Sesuai dengan gencarnya suara pembaharuan pemikiran Islam yang dicanangkan oleh para pembaharu Muslim dari berbagai negara, seperti Mesir, India, Turki, dan Pakistan, maka sampai juga gaung pembaharuan itu ke Indonesia, yang menyadarkan umat Islam dari kemunduran yang dialami. Salah satu

dampak dari “suara pembaharuan” itu adalah munculnya pembaharuan di bidang pendidikan (Ni'mah, 2015; Sholikhudin, 2016; dan Pirol, 2017).

Menurut M. Saridjo (1998), dan sarjana lainnya, awal abad ke-20 sering dikatakan sebagai masa kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya ide-ide dan usaha pembaharuan pendidikan Islam, baik oleh pribadi-pribadi maupun organisasi-organisasi keagamaan yang *concern* di bidang berkenaan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi pendidikan kaum Muslimin yang semakin terpuruk di berbagai wilayah, sejak diperkenalkannya sistem kelembagaan pendidikan baru oleh pemerintah kolonial Belanda, dalam rangka menghadapi berbagai tuntutan dan kebutuhan hidup masyarakat di masa modern (Saridjo, 1998:2; Rahman, 2016; dan Salim, 2016).

Ide dasarnya adalah bahwa memperbaharui sistem kelembagaan pendidikan Islam merupakan keniscayaan yang tak bisa ditunda-tunda, jika kaum Muslimin tidak ingin mengalami ketertinggalan dengan dunia Barat. Sisi yang perlu diperbaharui itu, pertama, dari segi isi (materi); kedua, dari segi metode; dan ketiga, dari segi manajemen dan administrasi pendidikan (Ni'mah, 2015:15; Mualimin, 2017; dan Priatmoko, 2018).

Pembaharuan-pembaharuan yang muncul itu merupakan awal kebangkitan global Islam di Indonesia menuju pembaharuan yang lebih baik, termasuk dalam bidang pendidikan. Ide dan inti dari pembaharuan itu adalah berupaya meninggalkan pola pemikiran lama yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan

diri dengan kemajuan zaman modern (Suryanegara, 1998:136; Firdaus, 2017; dan Komaruzaman, 2017).

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, begitu pula dengan pendidikan Islam. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentu saja, semakin banyak tantangan yang mesti dihadapi. Pendidikan Islam mesti mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman, tanpa harus meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Tantangan tersebut pun harus dihadapi oleh pesantren dalam memberikan pembelajaran kepada santri-santrinya (Jamila, 2016; Mubarak, 2018; dan Tesdy, Darmawan & Santosa, 2018:189).

Pesantren Tebuireng merupakan salah satu pesantren yang hingga hari ini tetap eksis. Pesantren ini terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pesantren Tebuireng merupakan satu diantara sekian pesantren yang mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini tidak terlepas dari peranan beberapa Kyai, yang menentukan perkembangan pendidikan di pesantrennya itu sendiri. Kyai senantiasa melakukan upaya pembaharuan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan (Mu'arif, 2015; Zuhdiyah, 2015; dan Syafe'i, 2017).

Dari beberapa Kyai yang melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng, salah satu diantaranya yang memiliki peranan cukup signifikan adalah K.H. (Kyai Haji) Abdul Wahid Hasyim. Beliau mengusulkan untuk diadakannya perubahan dalam hal tujuan pendidikan, kurikulum dan materi ajar, serta metode pengajaran (Suryanto, 2016; Chumaidah, 2018; dan Nurfadilah, 2019).

Masalah utama yang diangkat dalam

penelitian ini yaitu bagaimana peran K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam pembaharuan pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng pada tahun 1934-1953. Adapun kurun waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah 1934-1953, karena memiliki alasan tersendiri dalam pemilihan kurun waktu tersebut. Tahun 1934 menjadi awal tahun kajian penelitian, karena pada tahun tersebut K.H. Abdul Wahid Hasyim mendirikan Madrasah Nizamiyah dalam Pesantren Tebuireng dan menjadi awal dalam penerapan aspek-aspek pembaharuan pendidikan Islam oleh beliau di Pesantren Tebuireng. Sedangkan tahun 1953 dijadikan sebagai tahun pembatas penelitian, karena K.H. Abdul Wahid Hasyim sebagai penggagas pembaharuan pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng wafat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah, dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Metode sejarah adalah suatu proses menguji, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Garraghan, 1948; Gottschlak, 1975:32; Herlina, 2008; Zed, 2008; dan Creswell, 2010).

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat H. Sjamsuddin (2007), dan sarjana lainnya, yang menyatakan bahwa metode historis merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis dan sistematis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (McCullagh, 1984; Howell & Prevenier, 2001; dan Sjamsuddin, 2007:17-19). Dalam konteks ini, Ismaun (2005), dan sarjana lainnya, juga mengemukakan bahwa dalam

metode sejarah itu meliputi: (1) *Heuristik* atau pengumpulan sumber-sumber; (2) Kritik atau analisis sumber, baik eksternal maupun internal; (3) Interpretasi atau penafsiran; dan (4) Historiografi atau penulisan sejarah (Shafer, 1974; Ismaun, 2005:125-131; dan Pranoto, 2010).

Heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah, yang meliputi mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta-fakta atau sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber yang dikumpulkan oleh penulis mesti sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulisnya (Howell & Prevenier, 2001; Abdurahman, 2007; dan Kuntowijoyo, 2013:73).

Pada tahap *heuristik* ini pula, peneliti berusaha mencari berbagai sumber yang mendukung terhadap pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah, peneliti menggunakan teknik studi literatur. Untuk studi literatur, peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan dan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dikaji (Howell & Prevenier, 2001; Sjamsuddin, 2007; dan Zed, 2008).

Mengenai kritik sumber, ianya dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menyelidiki serta menilai secara kritis, apakah sumber-sumber yang terkumpul itu sesuai dengan permasalahan penelitian, baik bentuk maupun isinya, yang didasari oleh etos ilmiah yang menginginkan, menemukan, atau mendekati kebenaran. Adapun kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal (Lohanda, 1998; Howell & Prevenier, 2001; dan Sjamsuddin, 2007).

Kritik eksternal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan otentisitas atau

keaslian sumber sejarah dari penampilan luarnya atau fisiknya (Lohanda, 1998; Howell & Prevenier, 2001; dan Abdurahman, 2007). Dalam konteks ini, kritik eksternal dilakukan untuk menilai kelayakan sumber-sumber sejarah dan dijadikan bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini dari aspek luarnya, sebelum melihat isi dari sumber dan untuk mengurangi subjektivitas dari berbagai sumber yang didapatkan oleh peneliti. Kritik eksternal harus menegakkan *fakta dari kesaksian* bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang *ini* atau pada waktu *ini* atau segi *authenticity*; kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan atau segi *uncorrupted*; serta tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau penghilangan-penghilangan yang substansial atau aspek *integrity* (Howell & Prevenier, 2001; Kuntowijoyo, 2003:99; dan Sjamsuddin, 2007:134).

Sedangkan, kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal. Kritik internal dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yakni: penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber; serta membanding-bandtingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber itu dapat dipercaya atau diterima kredibilitasnya (Ustman, 1986; Howell & Prevenier, 2001; dan Priyadi, 2012:67).

Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan peneliti setelah mendapatkan fakta-fakta dari kritik sumber, kemudian dijadikan suatu kesatuan yang utuh sebagai hasil dari penafsiran peneliti. Terdapat tiga aspek penting dalam proses interpretasi atau penafsiran sejarah. *Pertama*, analisis-kritis, yaitu menganalisis struktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta. *Kedua*, historis-substantif, yaitu menyajikan suatu

uraian proses dengan dukungan fakta-fakta yang cukup, sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Dan ketiga adalah sosial-budaya, yaitu memperhatikan manifestasi insani dalam interaksi dan interrelasi sosial-budaya (McCullagh, 1984; Byrskog, 2001; dan Ismaun, 2005:56).

Historiografi merupakan langkah akhir dari keseluruhan prosedur penulisan karya ilmiah sejarah, yang merupakan kegiatan intelektual dan cara utama dalam memahami dan menuliskan kisah sejarah atau rekonstruksi sejarah (Kartodirdjo, 1992; Abdurahman, 2007; Sjamsuddin, 2007:156; Nurdholt *et al.*, 2008; dan Pranoto, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

K.H. (Kyai Haji) Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Desa Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari, tidak pernah menyekolahkan Abdul Wahid Hasyim ke HIS (*Hollandsche Inlandsche School*), Sekolah Dasar milik pemerintah kolonial Belanda, seperti halnya anak-anak tokoh masyarakat pada masa itu. Hal ini dikarenakan, K.H. Hasyim Asy'ari dikenal anti-sekolah yang didirikan oleh pihak penjajah (Adlom, 2014; Santoso & Sumarno, 2015; dan Redaksi Tempo, 2017:12). Hal ini juga diperkuat oleh pendapat S. Wahid (2000), yang menyatakan sebagai berikut:

[...] Eyang tidak bependidikan formal – karena sebagai putra seorang ulama yang anti penjajah, tidak mungkin masuk di bangku sekolah milik pemerintah Hindia Belanda – tetapi mempunyai pengetahuan yang luas berkat kemauannya yang keras untuk belajar, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Beliau adalah otodidak atau belajar sendiri, dari buku tanpa guru (Wahid, 2000:8).

Pada usia 5 tahun, Abdul Wahid Hasyim telah belajar membaca *Al-Qur'an* dan sudah pandai membaca kitab suci tersebut. Saat berumur 7 tahun, ia mulai mempelajari kitab *Fathul-Qarib*, *Minhajul Qawwim*, dan *Mutammimah* pada ayahnya; dan pada usia ini pula ia sudah *khatam* membaca *Al-Quran* dan mulai belajar di Madrasah Salafiyah di Pesantren Salafiyah (Mughni, 2013; Rifai, 2014:23; dan Puspitasari, 2017).

Pada umur 12 tahun, ia telah berhasil menamatkan sekolah madrasahnya, dan mulai mengajar adiknya, yaitu Karim Hasyim, tentang kitab pada malam hari. Selain ilmu agama, Abdul Wahid Hasyim juga giat dalam mempelajari ilmu-ilmu kesusasteraan bahasa Arab, tetapi cara belajarnya banyak menggunakan *muthala'ah* dan membaca sendiri. Kitab-kitab yang sering ditelaahnya saat itu adalah *Diwanusy-Syu'ara* (Antologi para Penyair) dan, oleh karenanya, tidak sedikit hafalan syair-syair dalam bahasa Arab. Syair-syair itu yang kemudian disusun ke dalam sebuah buku (Atjeh, 2015:162; Miftahuddin, 2017:29; dan Rohmah, 2018/2019).

Kemudian, pada usia 13 tahun, Abdul Wahid Hasyim pergi belajar ke Pondok Siwalan, Panji, Sidoarjo, Jawa Timur. Mondok yang pertama ini dilakukan pada bulan *Ramadhan*. Di tahun berikutnya, ia mondok di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di pondok pesantren ini pun hanya berlangsung beberapa hari saja. Sepulang dari Lirboyo, Abdul Wahid Hasyim tidak meneruskan belajar di pesantren lain, tetapi memilih untuk tinggal di rumah. Ayahnya pun tidak mempermasalahkan hal ini, karena Abdul Wahid Hasyim dinilai dapat menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Dan selama di

rumah tersebut, Abdul Wahid Hasyim pun terus belajar, walaupun secara autodidak (Hasan *et al.*, 1994:314; Yahya, 2007; Solahudin, 2013:184; Atjeh, 2015:162; dan Budi, 2019).

Umur 15 tahun, Abdul Wahid Hasyim mulai mengenal huruf Latin. Menurut M. Solahudin (2013), dan sarjana lainnya, tokoh lain yang juga turut berpengaruh dalam penguasaan ilmu-ilmu sekuler Abdul Wahid Hasyim ialah Muhammad Ilyas. Ia mengajarkan Abdul Wahid Hasyim, baik huruf Latin, bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Belanda. Ia pun bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu pengetahuan, walaupun dipelajari secara autodidak (Mughni, 2013; Solahudin, 2013:185; dan Budi, 2019).

Sejak saat itu, Abdul Wahid Hasyim banyak berlangganan majalah *Penyebar Semangat*, *Daulat Rakyat*, dan *Panji Pustaka*; sedangkan dari luar negeri, ia berlangganan majalah *Ummul Qura*, *Shautul Hijaz*, *Al-Lathiful Musawarah*, *Kullusyaiin wad-Dunya*, dan *Al-Itsnaain*. Sejak saat itu pula, ia belajar bahasa Belanda dengan jalan berlangganan dari *Sumber Pengetahuan* di Bandung, yang waktu itu masih bernama *Majalah Tiga Bahasa*. Abdul Wahid Hasyim mengambil dua bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Arab. Setelah selesai, barulah mengambil lagi giliran bahasa Inggris (Mughni, 2013; Atjeh, 2015:162; dan Santoso & Sumarno, 2015).

Pada tahun 1932, Abdul Wahid Hasyim berangkat naik haji ke Mekkah. Ia berangkat bersama dengan kakak sepupunya, Muhammad Ilyas serta Busyairi. Selain pergi untuk menunaikan ibadah haji, mereka pun akan meneruskan studinya memperdalam ilmu agama Islam.

Setibanya di Mekkah, baik Abdul Wahid Hasyim maupun Muhammad Ilyas, menyaksikan suatu komunitas dengan gairah belajar yang sangat tinggi. Abdul Wahid Hasyim beserta rekan-rekannya mengikuti pelajaran di Masjidil Haram, Mekkah, yang diasuh oleh Syaikh Umar Hamdan dan Syaikh Abdul Wahab al-Khuqir (Yahya, 2007; Solahudin, 2013:186; dan Budi, 2019).

Abdul Wahid Hasyim kembali ke Tanah Air pada tahun 1933. Namun, Muhammad Ilyas tidak ikut serta dengannya, dikarenakan ia masih ingin menimba ilmu agama di Mekkah, dan saat itu teman yang membersamai mereka, yakni Busyairi, meninggal dunia (Budairy & Zawawi, 2009:33; Mughni, 2013; dan Puspitasari, 2017).

Pergaulannya yang sangat luas dengan orang-orang dari berbagai bangsa, membuat Abdul Wahid Hasyim semakin luas dalam cara berpikir. Ia meyakini bahwa pengajaran Islam dan pergaulan yang beragam dapat mencapai kemajuan dan persatuan, yang dapat menuntun manusia ke arah perdamaian. Sepulangnya dari Mekkah, tepat saat Abdul Wahid Hasyim berusia 20 tahun, ia diminta oleh ayahnya, K.H. (Kyai Haji) Hasyim Asy'ari, untuk mengajar dan membimbing para Santri (Atjeh, 2015:167-168; Redaksi Tempo, 2017:20; dan Chumaidah, 2018).

Abdul Wahid Hasyim menikah dengan seorang perempuan bernama Solehah dan dikaruniai 6 orang anak. Abdul Wahid Hasyim, kemudian, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1953, dalam sebuah kecelakaan mobil di daerah Cimindi, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia (Yahya, 2007; Budi, 2019; dan Muslimah, 2019).

Sebelum terjun ke dalam organisasi, Abdul Wahid Hasyim melakukan

berbagai pertimbangan. Dalam masa pertimbangannya tersebut, ia mendirikan IKPI (Ikatan Pelajar Islam). Organisasi IKPI ini didirikannya pada tahun 1936. Tujuannya dalam mendirikan IKPI ini adalah sebagai wadah bagi para Santri untuk belajar berorganisasi (Yahya, 2007; Redaksi Tempo, 2017:51; dan Budi, 2019).

Barulah pada tahun 1938, Abdul Wahid Hasyim bergabung dengan NU (Nahdlatul Ulama). Mulanya, ia menjabat sebagai penulis Ranting NU Cukir pada tahun 1938, kemudian dipilih menjadi Ketua PC (Pengurus Cabang) NU Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1940, ia dipilih sebagai Ketua Anggota PB (Pengurus Besar) NU Bagian Ma'arif. Ia melakukan reorganisasi, baik kuantitas maupun kualitas madrasah-madrasah NU di seluruh Indonesia. Kemudian, pada tahun 1952, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB NU di Jakarta. Saat dipimpin oleh Abdul Wahid Hasyim, Lembaga Ma'arif ini menerbitkan jurnal bernama *Suluh Nahdlatul Ulama* setiap bulannya (Solahudin, 2013:192-193; Rifai, 2014:35; Atjeh, 2015:181; Suryanto, 2016; dan Syahriman & Mulyana, 2019).

Pada saat Abdul Wahid Hasyim memegang pimpinan Bagian Ma'arif di PB NU, ia mempergunakan segala kesempatan untuk mengatur urusan pendidikan dan pengajaran dalam NU. Atas inisiatifnya, Konsulat PB NU Jawa Timur melangsungkan pertemuan di Malang, dimana dibentuklah sebuah komisi khusus untuk kepentingan perguruan. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkanlah rancangan peraturan Rumah Tangga NU Bagian Perguruan dan Pendidikan. Inilah yang menjadi cikal-bakal universitas dan institut agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian pada tahun 1946, Wahid Hasyim menjadi Ketua *Tanfidziyyah* (Eksekutif) NU di Jakarta (Atjeh, 2015:181-183; Redaksi Tempo, 2017:54-55; dan Budi, 2019).

Pada masa awal pendudukan Jepang (1942-1945), Abdul Wahid Hasyim menjadi Ketua MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), yang dijabatnya sejak tahun 1940. Jabatan Ketua MIAI serta Ketua PB NU dipegangnya sampai tahun 1942. MIAI merupakan sebuah federasi yang berusaha menghimpun berbagai organisasi Islam di Indonesia, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937 (Yahya, 2007; Solahudin, 2013:193-194; Atjeh, 2015:192; Redaksi Tempo, 2017:43; dan Syahriman & Mulyana, 2019).

Organisasi MIAI berjalan terus hingga beberapa waktu pemerintahan balatentara Jepang berkuasa di Indonesia. Namun, kiprah Abdul Wahid Hasyim sebagai Ketua MIAI hanya berlangsung hingga tahun 1941. Ia mengundurkan diri, karena akan menjadi pimpinan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, membantu ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari. Abdul Wahid Hasyim kemudian benar-benar memimpin Pesantren Tebuireng, sepeninggal ayahnya pada tahun 1947 (Dhofier, 2011:147; Atjeh, 2015:357; Redaksi Tempo, 2017:43-45; Budi, 2019; dan Mulyani, 2019).

MIAI dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang, kemudian lahirlah MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1943. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh G. Barton (2002), sebagai berikut:

In October 1943, the Japanese abolished the Supreme Islamic Council of Indonesia and replaced it with an umbrella body that they named MASYUMI (Barton, 2002:45).

Terjemahan:

Pada Oktober 1943, Jepang menghapuskan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantinya dengan sebuah badan yang memayungi semua organisasi yang disebut dengan MASYUMI.

Ketua MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) saat itu adalah K.H. (Kyai Haji) Hasyim Asy'ari. Namun, dalam aktivitas harianya diserahkan kepada Ketua Muda-nya, yakni Abdul Wahid Hasyim. Alasan Jepang memilih K.H. Hasyim Asy'ari dari NU (Nadlatul Ulama), karena Jepang menaruh kepercayaan kepada NU, yang merupakan organisasi pemilik massa di desa-desa, khususnya umat Islam. Di MASYUMI, Abdul Wahid Hasyim diberi amanat menjadi Ketua II, dan sebagai Ketua Umumnya adalah K.H. Hasyim As'ari, Ketua I dan III adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimejo (Suryanegara, 1996:86-89; Solahudin, 2013:194; dan Fatoni, 2019).

Pada tahun 1944, pemerintah pendudukan Jepang meminta agar para Santri atau umat Islam di Indonesia pada umumnya masuk ke dalam *Heijo* (tentara cadangan Jepang), yang akan dikirim ke Burma. Permintaan pemerintah pendudukan Jepang ini tentu saja ditolak oleh Abdul Wahid Hasyim. Namun, ia memberikan usulan lain, agar para Santri sebaiknya dididik secara militer untuk kepentingan pertahanan dalam negeri guna menghadapi tentara Sekutu, yang sewaktu-waktu datang. Karena, jika para Santri ini dilatih dan dibawa ke luar negeri, hanya akan merepotkan mengingat mereka tidak mengenal medan atau lapangan (Benda, 1985; Anderson, 1988; Suwirta, 1989; Putri, Syaiful & Arif, 2019; dan Syarif, 2019).

Pemerintah pendudukan Jepang, kemudian, menyetujui usulan dari Abdul Wahid Hasyim ini, sehingga lahirlah beberapa laskar militer, salah satunya adalah Laskar *Hizbulah* (tentara Allah), yang dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin dari NU. Maka, diadakanlah upacara peresmian pasukan *Hizbulah* pada bulan Februari 1945, yang dihadiri oleh Petinggi Jawa *Gunseikan* (Pemerintah Tentara Angkatan Darat Jepang) dan pengurus MASYUMI, termasuk di dalamnya Abdul Wahid Hasyim sebagai Ketua II (Anderson, 1988; Solahudin, 2013:194; Atjeh, 2015:370; Redaksi Tempo, 2017:105; dan Putri, Syaiful & Arif, 2019).

Tentu saja, alasan pemerintah pendudukan Jepang menyetujui didirikannya organisasi semi militer oleh Ulama ini agar mudah dalam memobilisasi massa umat Islam untuk membantu Jepang dalam perang yang akan datang. Sedangkan alasan Abdul Wahid Hasyim sendiri memberikan usulan demikian adalah sebagai persiapan atau strategi untuk mengusir tentara Jepang di kemudian hari (Benda, 1985; Suwirta, 1989; Suryanegara, 1996:149; Kurasawa, 2015; dan Putri, Syaiful & Arif, 2019).

Kemudian, Abdul Wahid Hasyim pun pernah menjabat sebagai pelaksana kegiatan harian dari organisasi *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang, dimana dalam posisinya itu ia peroleh dari kepercayaan ayahnya, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Abdul Wahid Hasyim juga dipercaya untuk menjadi anggota dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*), yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945. Dalam BPUPKI, Abdul

Wahid Hasyim turut berkontribusi dalam sebuah panitia yang dinamakan Panitia Sembilan untuk merumuskan konstitusi negara Indonesia merdeka, yakni Piagam Jakarta (Benda, 1985; Suryanegara, 1996:82; Kahin, 2013:172; Redaksi Tempo, 2017:96; dan Budi, 2019).

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Abdul Wahid Hasyim sempat duduk dalam beberapa kabinet, diantaranya dalam Kabinet Presidensil pertama, ia menjabat sebagai Menteri Negara. Setelah jatuhnya Kabinet Presidensil pada bulan November 1945, segeralah dilanjutkan dengan Kabinet Parlementer, atau sering disebut Kabinet Sutan Syahrir I. Pada Kabinet Sutan Syahrir I, Abdul Wahid Hasyim tidak menjabat sebagai Menteri, akan tetapi pada saat Kabinet Sutan Syahrir III, November 1946 hingga Juli 1947, Abdul Wahid Hasyim kembali masuk dalam struktur pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri Negara. Kemudian dilanjutkan dalam Kabinet Mohamad Hatta, yang mana Abdul Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama RIS atau Republik Indonesia Serikat (Anderson, 1988; Kahin, 2013:202; Atjeh, 2015:721-722; Miftahuddin, 2017:86-87; dan Budi, 2019).

Memasuki tahun 1950-an, yakni pasca kemerdekaan Indonesia, dalam Kabinet Mohammad Natsir, Abdul Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pertama. Kemudian Kabinet Mohammad Natsir, digantikan dengan Kabinet Sukiman. Dalam kabinet ini pun, Abdul Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama kedua kalinya pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kahin, 2013:651; Atjeh, 2015:702; dan

Syahriman & Mulyana, 2019).

Semasa Abdul Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama, terdapat beberapa kebijakan yang dihasilkan, antara lain kebijakan dalam Ibadah Haji dan pendirian PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam). Perihal pemberangkatan Haji, pada masa tahun 1950-an, banyak mengalami permasalahan. Pada tanggal 17 Agustus 1951, misalnya, Abdul Wahid Hasyim menguraikan beberapa permasalahan pokok dalam perjalanan Haji. Anggota jemaah Haji Indonesia, umumnya, terdiri dari orang-orang dari lapisan bawah yang agak mampu, tetapi kurang pengetahuan umumnya. Hal ini menyebabkan, mereka menjadi sasaran bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk memecahkan masalah ini, Abdul Wahid Hasyim mengusahakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengatur perjalanan mereka. Abdul Wahid Hasyim kemudian mendirikan Yayasan Panitia Haji Indonesia pada tanggal 21 Januari 1950 (Mughni, 2013; Afandi, 2019; dan Syahriman & Mulyana, 2019).

Sebagai Menteri Agama, Abdul Wahid Hasyim juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.3170, tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta No.A.III/648 tanggal 9 Februari 1959, yang menetapkan Panitia Haji Indonesia sebagai satu-satunya badan resmi yang menyelenggarakan perjalanan Haji (Mughni, 2013; Redaksi Tempo, 2017:120-121; dan Afandi, 2019).

Abdul Wahid Hasyim pula menyiapkan kapal-kapal yang akan mengangkut Jemaah Haji. Pada tahun 1951, misalnya, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan

kapal-kapal dari Kongsi Tiga dan Inaco, tapi hanya mampu membawa 11,000 dari 14,000 calon Jemaah Haji. Untuk mengangkut sisanya, Abdul Wahid Hasyim dan timnya berangkat ke Jepang untuk mencari kapal tambahan. Ia memeroleh kapal milik maskapai Osaka Sissen Kaisha dari Jepang (Redaksi Tempo, 2017:120-121; Jannah, 2018; dan Afandi, 2019).

Abdul Wahid Hasyim juga mengadakan reformasi pelayanan Haji, yang tertuang dalam penetapan Menteri Agama No.31 tahun 1952, yang penjelasannya terdapat dalam bab VI, pasal I, yakni: (1) Menggerjakan surat-surat dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan urusan arsip, ekspedisi, dokumentasi, ataupun statistik; (2) Membuat rencana instruksi-instruksi, pengumuman-pengumuman, dan sebagainya, terkait hal-hal yang harus dikerjakan dalam urusan Haji, seperti pendaftaran, saringan, pemeriksaan dokter, undian, membeli dan mengisi blanko paspor Haji, perongkosan Haji, dan lainnya; serta (3) Mengadakan perundingan pendahuluan dengan instansi atau badan terkait mengenai persiapan yang bertalian dengan pelaksanaan musim Haji (Rifai, 2014:89; Jannah, 2018; dan Afandi, 2019).

Pada bulan Juni 1950 dan Agustus 1951, Abdul Wahid Hasyim telah menciptakan tiga jenis lembaga pendidikan Islam, yang menjadi cikal-bakal lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jasa-jasa Abdul Wahid Hasyim dalam Kementerian Agama ialah menerima pendirian PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Selain PTAIN, Abdul Wahid Hasyim pun mendirikan PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di hampir setiap

Karesidenan; serta SGHAN (Sekolah Guru dan Hakim Agama Negeri) di Yogyakarta, Bukittinggi, Bandung, dan Malang. Ketiga jenis pendidikan itu berjenjang dari sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, dan perguruan tinggi; dan mulai diselenggarakan pada Juli 1950. Semua murid dan mahasiswa diberikan beasiswa (Dhofier, 2011:149-152; Redaksi Tempo, 2017:96; dan Afandi, 2019).

Berawal dari keluarnya Peraturan Pemerintah No.34/1950 tanggal 14 Agustus 1950, mulai nyatakan langkah-langkah pertama menuju ke arah melaksanakan PTAIN, yang bertujuan memberi pengajaran tinggi dan sebagai salah satu pusat untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan tentang agama Islam, serta memiliki azas membentuk manusia susila yang berbudi luhur (Yudhyarta, 2013; Rohmah, 2018/2019; dan Afandi, 2019).

Segera setelah putusan kabinet, dibentuklah sebuah panitia bernama "Panitia Perguruan Tinggi Agama", yang kemudian berganti menjadi "Panitia Perguruan Tinggi Islam", yang diketuai oleh K.H. (Kyai Haji) Fathurrahman Kafrawi, yang terdiri dari 11 anggota. Diantara para anggotanya ialah sebagai berikut: (1) K.H. Fathurrahman Kafrawi, sebagai Ketua; (2) Prof. Drs. Abdullah Sigit; (3) Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo; (4) Muchtar Yahya; (5) Prof. Abd. Kahar Muzakkir; (6) Mahmud Yunus; (7) K.H. Faried Ma'ruf; (8) K.H. Abdullah Efendi; (9) Prof. Mr. Notosusanto; (10) Mr. Rusbandi; dan (11) M. Sulaiman (Mulyanti, 2011:62; Atjeh, 2015:739; dan Nurfadilah, 2019)

Selama 2 tahun 4 bulan, Abdul Wahid Hasyim mewariskan sejumlah

kebijakan, yaitu membidani lahirnya UU (Undang-Undang) Pendidikan RI (Republik Indonesia) Nomor 4 Tahun 1950. Sejumlah pasalnya tetap berlangsung sampai sekarang, diantaranya: (1) “*Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air*”, pasal 3; (2) “*Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar*”, pasal 10 ayat 2; (3) “*Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, bersama dengan Menteri Agama*” pasal 120 ayat 21; serta (4) “*Semua sekolah negeri diadakan pelajaran agama, dan orangtuanya ikut menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut*”, pasal 20, ayat 1 (Mughni, 2013; Afandi, 2019; dan Nurfadilah, 2019).

Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No.8 tahun 1950, Abdul Wahid Hasyim juga berhasil memasukkan pasal-pasal kebijakan pendidikan, diantaranya: (1) Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri; (2) Memimpin, menyokong, serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan agama lainnya; (3) Mengadakan pendidikan guru dan hakim agama, serta (4) Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama, rumah-rumah penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu (Dhofier, 2011:153-154; Afandi, 2019; dan Nurfadilah, 2019).

Berikut ini dipaparkan terkait peranan Abdul Wahid Hasyim dalam pembaharuan pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang. Pesantren Tebuireng didirikan pada 26 Rabi'ul Awal 1317 H (Hijriah), atau bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 1899, oleh K.H. Hasyim Asy'ari (Dhofier, 2011:101; A'dlom, 2014; dan Nurfadilah, 2019).

Mengenai aspek-aspek pembaharuan pendidikan Islam, yang dilakukan oleh Abdul Wahid Hasyim, dalam Pesantren Tebuireng adalah sebagai berikut:

Tujuan Pendidikan. Saat Abdul Wahid Hasyim kembali ke Tebuireng, pada tahun 1940-an, ia langsung terjun ke dunia pendidikan yaitu di Pesantren almamaternya, Tebuireng. Secara berhati-hati, ia menyusun dan mengembangkan ide-ide tentang pembaharuan pendidikan Islam. Dalam mengadakan pembaharuan terhadap sistem pendidikan Pesantren, Abdul Wahid Hasyim membuat perencanaan yang matang. Ia tidak menginginkan upayanya itu mengalami kegagalan. Untuk itu, ia menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya; (2) Menggambarkan cara mencapai tujuan itu; serta (3) Memberikan keyakinan bahwa dengan cara yang sungguh-sungguh, maka tujuan dapat dicapai (Maasyhuri, 2006:19; Nurfadilah, 2019; dan Syaiful, 2019).

Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam, khususnya di lingkungan Pesantren, lebih berkonsentrasi pada urusan *Ukhrawiyah* (Akhirat), nyaris terlepas dari urusan *Duniawiyah* (Dunia). Oleh karena itu, Pesantren didominasi oleh mata pelajaran

yang berkaitan dengan *fikih*, *tasawuf*, ritual-ritual sakral, dan sebagainya. Orientasi demikian ditimbulkan oleh sumber teologi yang fatalistik dan tidak rasional, sehingga menyebabkan tertinggalnya umat Islam dengan negara-negara lain (Maasyhuri, 2006:20; Ismail, 2016:323; dan Nurhabibah, 2018).

Dari hal tersebut, dirumuskanlah secara sederhana bahwa tujuan Pesantren ialah sebagai institusi yang berfungsi mencetak para ulama atau ahli agama belaka, sehingga mengakibatkan Pesantren menolak pelajaran non-agama masuk dalam kurikulum Pesantren. Hal tersebut beralasan, karena bidang pelajaran umum tidak sesuai dengan tujuan keagamaan yang dimiliki oleh Pesantren (Mughni, 2013; Ismail, 2016; Muzammil, 2017; dan Nurhabibah, 2018).

Terhadap kecenderungan demikian, maka Abdul Wahid Hasyim memberikan alternatif lain kepada para Santri. Ia juga mengusulkan agar mayoritas Santri yang belajar di Pesantren tidak bertujuan untuk menjadi Ulama. Alasannya, karena dalam kenyataannya bahwa dalam sistem pendidikan agama yang paling eksklusif pun, tidak semua siswanya dapat dicetak menjadi ulama (Arifin, 1993:83; Mughni, 2013; dan Muzammil, 2017).

Terdapat beberapa alasan bagi Abdul Wahid Hasyim untuk mengusulkan alternatif demikian, yaitu: (1) Santri tidak perlu menghabiskan waktu sampai puluhan tahun untuk belajar Bahasa Arab dan mengakumulasi pengetahuan dari para Kyai di berbagai Pesantren, karena mereka belajar di Pesantren hanya sekedar untuk mengetahui dasar-dasar ilmu agama; (2) Santri dapat mempelajari agama Islam dari buku yang ditulis dengan Bahasa Non-Arab; serta (3) Santri dapat memfokuskan

waktunya untuk mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan lainnya, yang dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan masyarakat (Mughni, 2013; Muzammil, 2017; and Chumaidah, 2018).

Namun, terlepas dari alasan di atas, Abdul Wahid Hasyim tetap mengharapkan adanya sebagian Santri yang benar-benar menjadi Ulama, dengan mempelajari Bahasa Arab dan pengetahuan agama Islam secara mendalam. Dapat disimpulkan, dengan demikian, bahwa tujuan pendidikan Islam di Pesantren adalah untuk mencetak Santri yang berkepribadian Muslim dan bertaqwa kepada Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), serta memiliki keterampilan, sehingga Santri dapat mandiri dan berkiprah pada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (cf Maasyhuri, 2006:21-22; Mulyanti, 2011; dan Solahudin, 2013:189).

Hal ini bersesuaian dengan pendapat N. Masruroh & Umiarso (2011), dan sarjana lainnya, bahwa pendidikan yang telah terkait dengan pembaharuan pendidikan Islam mampu menghasilkan beberapa hal, diantaranya, menghasilkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta IMTAK (Iman dan Takwa) yang diupayakan lewat perpaduan dua sistem pendidikan tradisional dan modern; dapat memunculkan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih khas sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia yang baru; serta akan menghilangkan dikotomi yang pada saat ini dirasa cukup tajam dalam dunia pendidikan (Masruroh & Umiarso, 2011:120; dan Nurhabibah, 2018).

Kurikulum atau “Leerplan”.

Abdul Wahid Hasyim melihat bahwa

lembaga Pesantren, dalam beberapa hal, tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Adanya kemiripan sistem belajar-mengajar model *Madrasah* dengan sistem belajar sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda, menimbulkan pandangan bahwa *Madrasah* sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak ke-Islam-an (*cf* Hasyim, 2016; Basyit, 2017; dan Chumaidah, 2018).

Sebagai langkah awal upaya pembaharuan pendidikan Islamnya, Abdul Wahid Hasyim mengadakan Sekolah Rintisan. Setelah setahun mengadakan Sekolah Rintisan dengan berhasil mengajar secara intensif empat orang Santri, diantaranya adalah: A. Wahab Turham dari Surabaya, Jawa Timur; A. Moghni Rais dari Cirebon, Jawa Barat; Meidari dari Pekalongan, Jawa Tengah; dan Faqih Hassan dari Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur. Proyek Sekolah Rintisan dari Abdul Wahid Hasyim ternyata tidak berjalan mulus. Dari keempat Santri yang digembleng, hanya dua yang bisa mengikuti pemikirannya, sedangkan dua lainnya berhenti di tengah jalan. Namun, lewat kedua Santri yang dididik sungguh-sungguh itu, Abdul Wahid Hasyim yakin bahwa pembaharuan Pesantren dengan memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum dapat dilakukan (Mughni, 2013; Santoso & Sumarno, 2015; dan Miftahuddin, 2017:38-39).

Berawal dari Sekolah Rintisan yang dibuatnya, Abdul Wahid Hasyim pun mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah yang dibentuk pada 1934 ini menjadi terobosan pendidikan di kalangan NU (*Nahdlatul Ulama*), karena untuk pertama kalinya ada Pesantren yang mengembangkan pendidikan umum

sampai 70 persen (Redaksi Tempo, 2017:73; Nurfadilah, 2019; dan Teguh, 2019).

Nama “Madrasah Nizamiyah” sama dengan nama madrasah pada masa Islam klasik, yang pendiriannya disponsori oleh PM (Perdana Menteri) dari Bani Saljuk, yakni Nizîm al-Mulk, wafat pada 1092 M (Masehi). Dengan nama itu, sepertinya ada maksud dari Abdul Wahid Hasyim, yang ingin menujukkan kepada khalayak Muslim pada zamannya bahwa sistem pembelajaran di Madrasahnya telah dimodernisasi dan diorganisir secara teratur atau *nidhâm*. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dari segi struktur kurikulum, yang untuk ukuran zamannya, Madrasah gagasan Abdul Wahid Hasyim ini bisa jadi sangat progresif, terlebih untuk lingkungan Pesantren. Karena selain bersifat campuran, kurikulum tersebut memberikan porsi lebih besar untuk pengajaran mata pelajaran umum, bahkan hingga 70 persen dari keseluruhan programnya, seperti yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk sekolah-sekolah Madrasah sejak tahun 1975 (As'ad, 2012:120; Sa'dillah, 2015; dan Nurfadilah, 2019).

Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa selain *Madrasah Nizamiyah*, nama madrasah yang didirikan oleh Abdul Wahid Hasyim ini bernama *Madrasah Mu'allimien*. Hal ini didukung oleh pernyataan K.H. (Kyai Haji) M. Dahlan, sebagaimana dikutip oleh A. Atjeh (2015) dan sarjana lainnya, bahwa sekembalinya dari Makkah, almarhum K.H. Abdul Wahid Hasyim mendirikan *Madrasah Mu'allimien* di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia (Atjeh, 2015:316; Rohmah, 2018/2019; dan Nurfadilah, 2019).

Didirikannya Madrasah Nizamiyah oleh Abdul Wahid Hasyim atas dasar pertimbangan bahwa kurikulum Pesantren yang hanya memfokuskan kepada ilmu-ilmu agama mengakibatkan Santri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan siswa yang memeroleh pendidikan Barat. Menurut Abdul Wahid Hasyim, kelemahan Santri disebabkan oleh lemahnya penguasaan pengetahuan umum, bahasa asing, serta keterampilan teknis profesional dan berorganisasi. Jika Santri mampu untuk menguasai ketiga komponen tersebut, maka mereka akan mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang mendapatkan pendidikan Barat dalam masyarakat (Mughni, 2013; Paisun, 2018; dan Afandi, 2019).

Maka dari itu, di samping pengajaran Bahasa Arab, Abdul Wahid Hasyim pun mendesain kurikulum madrasah yang di dalamnya diadakan pengajaran Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Tetapi Abdul Wahid Hasyim tetap berpegang kepada *Al-Hadist* bahwa, “*Barang siapa mengetahui bahasa sesuatu golongan, ia akan aman dari perkosaan golongan itu*”; dan pepatah bahwa, “*Bahasa itu adalah kunci ilmu pengetahuan*”. Mata pelajaran lain yang diajarkan adalah Aritmatika, Sejarah, Geografi, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Para Santri juga diperkenalkan dengan kursus mengetik dan berpidato (*cf* Maasyhuri, 2006:23; Solahudin, 2013:187; Atjeh, 2015:171; Rusydiyah, 2017; dan Afandi, 2019).

Saat Madrasah Nizamiyah dibuka, tidak banyak orangtua yang bersedia mengirimkan anaknya ke madrasah ini. Pada awal berdirinya, Madrasah Nizamiyah hanya memiliki satu kelas dengan muridnya sejumlah 29 orang, termasuk Abdul Karim Hasyim, adik

Abdul Wahid Hasyim. Dengan madrasah model baru ini, Abdul Wahid Hasyim banyak menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Namun, ia tetap teguh dengan pendiriannya (Miftahuddin, 2017:39; Redaksi Tempo, 2017:75; dan Nurfadilah, 2019).

Keberadaan Madrasah Nizamiyah ini pun dirasa semakin banyak mendatangkan faedah. Orang-orang semakin kagum melihat anak-anak Kyai, yang disamping dapat ber-Bahasa Arab, namun juga dapat ber-Bahasa Belanda dan Inggris. Adanya pelajaran Bahasa Belanda dan Inggris yang tidak ditemukan di Pesantren lainnya, menarik para remaja untuk belajar di madrasah ini. Selain bahasa asing, juga mulai diperkenalkannya kursus-kursus pidato dan mengetik. Karena itu, Abdul Wahid Hasyim pun menambahkan dua hingga tiga kelas lagi (Solahudin, 2013:187; Rusydiyah, 2017; dan Nurfadilah, 2019).

Madrasah Nizamiyah pun, kemudian, semakin subur dan maju. Muridnya bertambah banyak dan datang dari berbagai daerah. Abdul Wahid Hasyim pun, pada akhirnya, menambah dua kelas lagi, yang diisi dengan berpuluhan-puluhan orang murid. Madrasah Nizamiyah akhirnya terdiri dari: kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Adapun diantara Guru-guru yang turut menyumbangkan tenaganya dalam Madrasah Nizamiyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, selain dari Abdul Wahid Hasyim, ialah: A. Wahab Turham, A. Azis Jabar, Nurmandi, Abdurrahman, Abdul Hamid, dan A. Karim Hasyim (Ismail, 2016:324; Rusydiyah, 2017; dan Nurfadilah, 2019).

Upaya yang dilakukan oleh Abdul Wahid Hasyim merupakan sebuah inovasi di kalangan Pesantren. Maka usahanya ini

pun memperoleh banyak kritikan, baik dari kalangan masyarakat maupun dari para Ulama sendiri. Abdul Wahid Hasyim dianggap mencampur-adukkan perkara agama dan dunia. Ia juga dianggap telah merusak sistem pendidikan Pesantren. Namun, semua kritikan tersebut ia sambut dengan tenang dan tetap berjalan dengan keyakinannya sebagai seorang Ulama idealis (Mughni, 2013; Suryanto, 2016; dan Muzammil, 2017).

Abdul Wahid Hasyim pun berupaya untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, yang saat itu melanda dunia pendidikan Islam umumnya dan pendidikan Islam di Pesantren khususnya. Adanya dikotomi dalam pendidikan di Indonesia merupakan warisan masa kolonial Belanda. Menurut Abdul Wahid Hasyim, adanya dikotomi tersebut sangat berbahaya bagi umat Islam Indonesia. Karena, sistem pendidikan semacam ini akan melahirkan banyak ilmuwan atau ulama yang tidak kenal dengan kebutuhan zamannya (Maasyhuri, 2006:23-24; Rusydiyah, 2017; dan Nurfadilah, 2019).

Madrasah yang didirikan oleh Abdul Wahid Hasyim ini hanya berumur 2 tahun. Pada tahun 1937, Madrasah Nizamiyah ditutup, dan digabungkan dengan Madrasah Salafiyah, madrasah yang lebih dulu berdiri di Pesantren Tebuireng, Jombang. Ditambah lagi, ketika Abdul Wahid Hasyim mulai aktif di NU (*Nahdlatul Ulama*) pada tahun 1936 dan menjadi Pimpinan NU Jombang pada tahun 1938, dimana sejak saat itu ia lebih memilih menjadi seorang politikus daripada seorang pemimpin Pesantren, menjadi faktor lain Madrasah Nizamiyah ini ditutup. Bubarnya

Madrasah Nizamiyah bukan berarti ide modernisasi di Pesantren Tebuireng berakhir. Justru, ia menjadi pemicu bagi lahirnya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam lainnya (Arifin, 1993:84; Solahudin, 2013:189-190; Redaksi Tempo, 2017:77; Nurfadilah, 2019; dan Syaiful, 2019).

Metode Pengajaran. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui atau memahami terhadap segala sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis serta komprehensif. Dalam rangkaian sistem pengajaran, metode menempati urutan sesudah materi yang akan disampaikan. Metode akan mengikuti materi, dalam artian mengadaptasikan dengan bentuk dan coraknya, sehingga metode mengalami transformasi, bila materi yang sama dipakai metode yang berbeda-beda (Qomar, 2005:20; Masruroh & Umiarso, 2011:122; dan Reksiana, 2018).

Maka dari itu, ketika terjadi pembaharuan dalam pendidikan Islam di Pesantren, khususnya di Tebuireng, yang salah satunya ditandai dengan dimasukkannya beberapa materi ajar baru non-agama Islam ke dalam kurikulumnya, maka metode pengajaran yang harus disampaikan pun turut mengalami transformasi dan perubahan. Sebagai lembaga tertua, sejarah perkembangan pondok Pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran *wetonan* dan *sorogan* (Amrizal, 2011; Basyit, 2017; dan Nisa & Chotimah, 2020).

Metode *wetonan* atau *halaqah* adalah metode yang di dalamnya terdapat seorang Kyai yang membacakan suatu kitab dalam suatu waktu tertentu, sedangkan Santrinya membawa kitab

yang sama, lalu Santri tersebut bertugas untuk mendengar dan menyimak penjelasan Kyai. Sedangkan metode *sorogan* merupakan metode belajar mengajar secara individual, dimana seorang Santri yang cukup pandai mengajukan sebuah kitab kepada Kyai untuk dibaca di hadapannya, dan kesalahan dalam bacaannya itu langsung akan dibetulkan oleh Kyai bersangkutan (Syaifullah, 2017; Khakim, 2018; dan Afif, 2019).

Hal ini diperkuat oleh pendapat A. Zaini (1998), yang menyatakan sebagai berikut:

The “bandongan”, which is also called “weton” or “halaqah”, is a method in which the students studied the Islamic sciences together in a large group under the instruction of the “Kyai”. They came to the class to listen to the “Kyai” read from and explain a text on a certain subject, adding vocalization, and writing particular notes, when they could not understand the meaning of the Arabic. Viewed from the angle of intellectual development, this method is useful only for students who are bright and have a strong commitment to study (Zaini, 1998:46).

Terjemahan:

Bandongan, atau disebut juga *weton* atau *halaqah*, adalah sebuah metode yang di dalamnya murid-murid belajar ilmu agama Islam bersama dalam sebuah kelompok besar di bawah instruksi dari Kyai. Mereka (murid/santri) datang ke kelas untuk mendengarkan apa yang dibacakan dari Kyai dan penjelasan suatu teks pada subjek tertentu, menambahkan vokalisasi, dan menulis catatan khusus ketika mereka tidak bisa memahami arti Bahasa Arab. Dilihat dari sudut perkembangan intelektual, metode ini berguna bagi siswa yang cerdas dan memiliki komitmen yang kuat untuk belajar.

Telah diungkapkan di atas bahwa di Pesantren saat itu hanya mengenal sistem *sorogan*, *wetonan*, dan *bandongan*. Model pengajaran seperti demikian, khususnya *bandongan*, menurut Abdul

Wahid Hasyim membuat Santri menjadi pasif. Hal ini karena dalam kelas yang menggunakan sistem *bandongan*, Santri hanya datang untuk mendengar, mencatat, dan menghafalkan pelajaran yang diberikan, tidak ada kesempatan bagi Santri untuk bertanya dan berdiskusi. Menurut Abdul Wahid Hasyim, sistem seperti ini hanya akan menciptakan kepasifan dalam diri Santri (Solahudin, 2013:188; Muzammil, 2017; dan Nurfadilah, 2019).

Sebagaimana dinyatakan oleh I. Arifin (1993), yang menuturkan pengalaman Kyai Anwar sebagai salah seorang Santri dan menyaksikan berdirinya Madrasah Nizamiyah, sebagai berikut:

Sekitar tahun 1930-an, tepatnya sekitar tahun 1933, pokoknya masih jaman Belanda, Gus Wahid (Kyai Wahid) pulang ke Tebuireng dari menunaikan ibadah Haji dan belajar di sana (Makkah). Waktu itu seluruh warga Pesantren menyambutnya dengan meriah, [...] tidak berapa lama, Gus Wahid mendirikan semacam madrasah yang disebut Madrasah Nidhomiyah, pengikutnya banyak waktu itu sekitar 30-an orang, mereka semua adalah para santri Tebuireng, belajarnya di teras masjid, pelajaran tidak hanya agama dan Bahasa Arab, tetapi juga pengetahuan umum, termasuk pelajaran huruf Latin, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris.

Karena peminatnya banyak, waktu itu sampai dibagi tiga kelas. Dan, madrasah ini sampai sempat mendirikan “Bibliotheek” (Perpustakaan) segala. Tetapi Gus Wahid aktif di NU, Madrasah Nidhomiyah tidak lagi dikelola dengan baik, sehingga lama-lama bubar sendiri (Arifin, 1993:83).

Selain itu, Abdul Wahid Hasyim pun menganjurkan para Santri untuk belajar organisasi dan membaca. Untuk itu, pada 1936, Abdul Wahid Hasyim mendirikan IKPI (Ikatan Pelajar Islam), dengan ia sendiri sebagai Ketua-nya. Organisasi ini banyak diminati oleh para generasi muda, sehingga hanya dalam waktu singkat

telah memiliki anggota sebanyak lebih dari 300 orang. IKPI pun mendirikan taman bacaan atau perpustakaan, dengan koleksi buku hampir 1,000 buku, dan kebanyakan adalah tentang keagamaan. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku dalam berbagai bahasa, seperti Indonesia, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Belanda, dan Inggris. Perpustakaan tersebut berlangganan majalah dan surat kabar, seperti: *Panji Islam, Dewan Islam, Islam Bergerak, Berita Nahdlatul Ulama, Adil, Nurul Islam, Al-Munawarah, Panji Pustaka, Pustaka Timur, Pujangga Baru, dan Penyebar Semangat*. Jurnal-jurnal tersebut mewakili pandangan kaum tradisionalis, modernis, dan nasionalis (Maasyhuri, 2006:25; Solahudin, 2013:188; dan Nurfadilah, 2019).

Dengan adanya perubahan metode pengajaran dan didirikannya perpustakaan, ia merupakan sebuah kemajuan luar biasa yang terjadi dalam lingkungan Pesantren saat itu. Dengan hal tersebut, Abdul Wahid Hasyim berharap akan terjadi proses belajar-mengajar yang dialogis, dimana guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar; dan pendapat guru bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak terbantahkan. Proses belajar juga berorientasikan pada murid. Murid tidak hanya dijadikan sebagai objek pendidikan, namun juga sebagai subjek pendidikan itu sendiri. Sedangkan guru hanya memposisikan diri sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar. Hal itu menunjukkan, kendati secara perlahan-lahan, telah ada benih-benih upaya penyampaian pelajaran secara modern, layaknya seperti di sekolah-sekolah umum (Maasyhuri, 2006:26; Masruroh & Umiarso, 2011:127-128; dan Nurfadilah, 2019).

KESIMPULAN¹

K.H. (Kyai Haji) Abdul Wahid Hasyim lahir pada 1 Juni 1914 di Desa Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dalam hal pendidikan, Abdul Wahid Hasyim tidak memeroleh pendidikan formal, seperti layaknya anak-anak tokoh lain yang hidup pada masa itu, dikarenakan ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai Ulama yang anti sekolah yang didirikan oleh kaum penjajah. Abdul Wahid Hasyim mengenyam pendidikan di Madrasah Salafiyah di Tebuireng, Jombang dan di pesantren-pesantren lainnya untuk menuntut ilmu agama Islam. Selain ilmu agama, ia pun banyak belajar ilmu-ilmu pengetahuan umum, seperti bahasa asing (Inggris dan Belanda). Pada tahun 1932, Abdul Wahid Hasyim, bersama sepupunya, pergi ke Mekkah untuk beribadah Haji dan melanjutkan studi. Di sinilah nantinya akan tergugah gagasan Abdul Wahid Hasyim terkait pembaharuan pendidikan Islam.

Selain dalam hal akademik, Abdul Wahid Hasyim pun dikenal sangat aktif dalam berorganisasi. Adapun organisasi yang diikutinya meliputi IKPI (Ikatan Pelajar Islam), NU (*Nahdlatul Ulama*), MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia), MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin

¹ **Sebuah Pengakuan:** Artikel ini – sebelum diperbaiki dan dikemas-kini dalam bentuknya sekarang – pada mulanya merupakan Ringkasan Skripsi Sarjana dari Penulis I, yang dibimbing oleh Penulis II dan Penulis III, di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penulis I mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak – termasuk kepada Penulis II dan Penulis III, serta kepada para Pengaji Sidang Sarjana di Departemen Pendidikan Sejarah pada bulan Juli 2019 – yang telah memberikan dorongan semangat, kritik, komentar, dan saran-saran dalam penulisan karya ilmiah ini. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab akademik kami bertiga, selaku Penulis, dan tidak ada hubung-kaitnya dengan berbagai bantuan yang telah diberikan oleh pihak lain.

Indonesia), *Shumubu* (Kantor Urusan Agama), BPUPKI (Badan Penyelidik dan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam masa setelah kemerdekaan, Abdul Wahid Hasyim diamanati beberapa jabatan dalam pemerintahan Indonesia, seperti jabatan Menteri Negara dan Menteri Agama dalam beberapa kabinet di Indonesia. Saat menjadi Menteri Agama, Abdul Wahid Hasyim pun menghasilkan beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan dalam pemberangkatan ibadah Haji dan pendirian PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam).

Adanya upaya pembaharuan dari Abdul Wahid Hasyim dalam pendidikan Islam ini berawal dari munculnya gerakan Pan Islamisme di Timur Tengah. Ide-ide dan gagasan dari gerakan ini pun menyebar ke seluruh dunia, dan salah satunya berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam. Saat Abdul Wahid Hasyim melakukan studi di Mekkah, beliau pun turut menyerap ide-ide pembaharuan tersebut. Dan, sepulangnya ke Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, ia pun berkeinginan untuk menerapkan ide-ide pembaharuan tersebut ke dalam pendidikan Pesantren. Ia mengusulkan beberapa ide, seperti penggantian metode belajar dan penambahan materi pelajaran umum ke dalam kurikulum Pesantren.

Awalnya, ide-ide yang diusulkan oleh Abdul Wahid Hasyim itu memeroleh banyak kritik dan penolakan, bahkan K.H. Hasyim Asy'ari – ayahanda Abdul Wahid Hasyim – pun menolak pada awalnya, karena alasan tertentu. Namun, pada akhirnya, terdapat beberapa ide yang dapat diterima dan diterapkan dalam lingkungan pendidikan Pesantren. Salah

satunya adalah dengan didirikan Pesantren modern, yang dinamai Madrasah Nizamiyah.

Adapun aspek-aspek pembaharuan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Abdul Wahid Hasyim meliputi: *Tujuan Pendidikan, Kurikulum, dan Metode Pengajaran*. Tujuan Pendidikan yang dimaksud oleh Abdul Wahid Hasyim disini ialah untuk menciptakan atau membentuk Santri yang bertakwa dan mampu menguasai pengetahuan umum serta keterampilan praktis lainnya, agar Santri dapat siap berkontribusi dalam masyarakat kelak. Ia tidak ingin Santri-santri lulusan Pesantren dinilai rendah kedudukannya dalam masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya pembaharuan dalam hal Tujuan Pendidikan ini dapat mewadahi cita-citanya dalam menyetarakan kedudukan siswa lulusan Pesantren dengan siswa lulusan sekolah umum atau sekolah Belanda, supaya dapat bersaing di dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam aspek Kurikulum. Pada awalnya, Kurikulum Pesantren hanyalah dan didominasi oleh ilmu-ilmu pengetahuan agama. Namun, setelah Abdul Wahid Hasyim mengusulkan ide pembaharuan, dimasukkanlah beberapa ilmu pengetahuan umum ke dalam Kurikulum Pesantren, bahkan hingga 70%. Ilmu-ilmu pengetahuan umum tersebut, diantaranya, Bahasa Belanda dan Inggris, Aritmatika, Sejarah, Geografi, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Selain itu, Abdul Wahid Hasyim juga menyarankan kepada Santri untuk mengikuti berbagai organisasi dan memperkaya khazanah berpikir melalui membaca berbagai macam bacaan yang telah disediakan di perpustakaan yang telah didirikannya. Adapun organisasi

yang disarankannya tersebut adalah organisasi bernama IKPI (Ikatan Pelajar Islam).

Dan yang terakhir, aspek Metode Pengajaran. Metode Pengajaran di Pesantren tradisional saat itu menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan*. Metode ini dinilai oleh Abdul Wahid Hasyim membuat siswa pasif dan tidak bisa menumbuhkan inisiatif. Karena metode-metode ini hanya mewajibkan siswa untuk datang, mendengarkan, dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru mereka. Maka dari itu, Abdul Wahid Hasyim mengusulkan agar metode pengajaran diganti oleh metode tutorial kelas, dimana Santri dapat ikut terlibat dalam pembelajaran, seperti berdiskusi dan bertanya pada guru. Abdul Wahid Hasyim berharap dengan diterapkannya metode ini dapat menumbuhkan daya kritis dan inisiatif dalam diri Santri saat belajar, sehingga kelak jika sudah lulus dapat memiliki daya saing didalam masyarakat.

Semua upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Abdul Wahid Hasyim itu, baik dalam aspek Tujuan Pendidikan, Kurikulum, maupun Metode Pengajaran, terwadahi dalam sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikannya, yakni Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah didirikan pada 1934. Pada awalnya, madrasah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, tetapi setelah beberapa waktu kemudian muncullah ketertarikan masyarakat, khususnya para orangtua calon Santri untuk menyekolahkan anaknya ke Madrasah Nizamiyah.

Madrasah Nizamiyah hanya berdiri sampai tahun 1938. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, Abdul Wahid Hasyim sudah mulai berkonsentrasi pada karier

politiknya, sehingga Madrasah Nizamiyah akhirnya dilebur bersama madrasah yang sudah ada sebelumnya, yakni Madrasah Salafiyah.²

Referensi

- Abdurahman, Dudung. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- A'dlom, Syamsul. (2014). "Kiprah K.H. Hasyim Asy'ari dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam" dalam *Jurnal Pusaka*, Edisi Juli-Desember, hlm.14-27.
- Afandi, Achmad. (2019). "Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa K.H.A. Wahid Hasyim". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Surabaya: Pascasarjana UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Ampel. Available online also at: http://digilib.uinsby.ac.id/31333/1/Achmad%20Afandi_F02316045.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Januari 2020].
- Aff, Moh. (2019). "Penerapan Metode Sorogan dalam Meningkatkan Baca Kitab di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in" dalam *KABILAH : Journal of Social Community*, Vol.4, No.2 [December], hlm.34-43. Tersedia secara online juga di: <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/3592> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Januari 2020].
- Amrizal. (2011). "Pembaruan Pendidikan Pesantren dalam Kerangka Sistem Pendidikan Nasional" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.8, No.02 [Juli-Desember], hlm.168-183. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/40426-ID-pembaruan-pendidikan-pesantren-dalam-kerangka-sistem-pendidikan-nasional.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Maret 2019].
- Anderson, Ben. (1988). *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, terjemahan oleh Jiman Rumbo.

²**Pernyataan:** Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa artikel ini, beserta seluruh isinya, adalah benar-benar karya kami sendiri. Kami tidak melakukan penjiplakan dan tindakan plagiat, karena sumber-sumber yang kami kutip, jelas dinyatakan dan dicantumkan secara lengkap dalam Daftar Pustaka atau Referensi. Artikel ini juga belum pernah diserahkan dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya. Atas pernyataan ini, kami siap menanggung risiko atau sanksi akademik, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya kami ini.

- Arifin, I. (1993). *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimahsada Press.
- As'ad, M. (2012). "Pembaruan Pendidikan Islam K.H. Hasyim Asyari" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Volume 8(1), hlm.120-134.
- Atjeh, A. (2015). *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Barton, G. (2002). *Gus Dur : The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Penerbit Subur.
- Basyit, Abdul. (2017). "Pembaharuan Model Pesantren: Respon terhadap Modernitas" dalam *KORDINAT*, Vol.XVI, No.2 [Oktober], hlm.293-324.
- Benda, Harry J. (1985). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae dan disunting oleh Alfian.
- Bisri, A. (2011). "Pemikiran Pendidikan K.H.A. Wahid Hasyim" dalam *Jurnal Akademika*, Volume 5(2), hlm.163-176.
- Budairy, S. & A. Zawawi. (2009). *Dari Pesantren untuk Bangsa: Biografi K.H. Muhammad Ilyas*. Jakarta: Penerbit Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Budi. (2019). "Biografi K.H. Wahid Hasyim" dalam *LADUNI: Menyatukan untuk Mercusuar Dunia*, pada 11 Maret. Tersedia secara online juga di: <https://www.laduni.id/post/read/55855/biografi-kh-wahid-hasyim> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Januari 2020].
- Byrskog, Samuel. (2001). *Story as History-History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History*. German: Mohr. Siebeck.
- Chumaidah, Syc. (2018). "K.H. A. Wahid Hasyim dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Tersedia dan ada dimiliki oleh Penulis.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Terjemahan, edisi ketiga.
- Damami, Mohammad. (2000). *Akar Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Fatoni, Achmad. (2019). "Kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam MASYUMI Tahun 1943-1950". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surabaya: Program Studi Pimikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Ampel. Tersedia secara online juga di: http://digilib.uinsby.ac.id/36670/2/Achmad%20Fatoni_E04213001.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Januari 2020].
- Firdaus, Sukma Umbara Tirta. (2017). "Pembaharuan Pendidikan Islam Ala Harun Nasution: Sebuah Refleksi Akan Kerinduan 'Keemasan Islam'" dalam *EL-FURQANIA*: Vol.05, No.02 [Agustus], hlm.166-184.
- Garraghan, J. Gilbert. (1948). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gottschlak, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press, Terjemahan.
- Hasan, M. et al. (1994). *Menapak Jejak Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Hasyim, Muhammad. (2016). "Modernisasi Pendidikan Pesantren dalam Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid" dalam *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.2, No.2 [Desember]. Tersedia secara online pula di: <https://media.neliti.com/media/publications/268491-modernisasi-pendidikan-pesantren-dalam-p-00907b96.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 18 Maret 2019].
- Herlina, Nina. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Penerbit Satya Historika.
- Howell, Martha & Walter Prevenier. (2001). *From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Ismail, M. (2016). "Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan K.H. Abdul Wahid Hasyim" dalam *Pendidikan Agama Islam*, Volume 4(2), hlm.323-324.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Jamila. (2016). "Pendidikan Berbasis Islam yang Memandirikan dan Mendewasakan" dalam *Jurnal EduTech*, Vol.2, No.2 [September], hlm.73-83. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/58765-ID-pendidikan-berbasis-islam-yang-memandiri.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Jannah, Rina Farihatul. (2018). "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia, Tahun 1945-2000 M'. *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Surabaya: Pasca Sarjana UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Ampel. Tersedia secara online juga di: http://digilib.uinsby.ac.id/25459/7/Rina%20Farihatul%20Jannah_F52916197.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Maret 2019].
- Kahin, G.M.T. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khakim, Nor. (2018). "Sorogan Menjadi Model Pembelajaran di Pesantren Darul Muttaqin Bantargebang". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Jakarta: STKIP [Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu

- Pendidikan] Kusuma Negara.
- Komaruzaman. (2017). "Studi Pemikiran Muhammad Abdur dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan di Indonesia" dalam *TARBAWI*, Vol.3, No.01, hal.82-101.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Kencana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Kurasawa, Aiko. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Perdesaan, 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu, diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyo.
- Kurniyati, E. (2018). "Memahami Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia" dalam *Rausyan Fikr*, Vol.14, No.1 [Maret], hlm.1-19.
- Lohanda, Mona. (1998). *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UI [Universitas Indonesia].
- Maasyhuri, A. (2006). *99 Kiai Pondok Pesantren Nusantara II: Riwayat, Perjuangan, dan Doa*. Yogyakarta: Penerbit Kutub.
- Masruroh, N. & Umiarso. (2011). *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- McCullagh, C. Behan. (1984). *Justifying Historical Descriptions*. New York: Cambridge University Press.
- Miftahuddin. (2017). *K.H.A. Wahid Hasyim: Peletak Dasar Islam Nusantara*. Bandung: Penerbit Marja.
- Mualimin. (2017). "Lembaga Pendidikan Islam Terpadu" dalam *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.1, hlm.99-116.
- Mu'arif, Amrul. (2015). "Modernisasi Pendidikan Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Malang: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN [Universitas Islam Negeri] Maulana Malik Ibrahim. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/download/pdf/79435575.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Mubarak, Faisal. (2018). "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia" dalam *Jurnal Ta'lim Mut'a'llim*, Vol.4, No.8, hlm.225-242. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/download/pdf/79442943.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Mughni, Syafiq Akhmad. (2013). "Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang Pembaharuan Pendidikan Islam". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24748/3/SYAFIQ%20AKHMAD%20MUGHNI-FITK.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Maret 2019].
- Mulyani, Tatik. (2019). "Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) dalam Pergerakan Nasional Tahun 1937-1942". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Tersedia dan ada dimiliki oleh Penulis.
- Mulyanti. (2011). "Pembaruan Pendidikan Islam K.H.A. Wahid Hasyim: Menteri Agama RI, 1949-1952". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.
- Muslimah, Fauziah. (2019). "Nyai Solihah Wahid Hasyim: Sosok Perempuan Tangguh untuk Keluarga, Agama, dan Negara" dalam *GoMuslim Co.Id*, pada 30 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.gomuslim.co.id/read/tokoh/2019/06/30/13077/-p-nyai-solihah-wahid-hasyim-sosok-perempuan-tangguh-untuk-keluarga-agama-dan-negara-p-.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Januari 2020].
- Mustofa, Ali. (2019). "Arah Pembaruan Pendidikan Islam: Analisis Sejarah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Tersedia dan ada dimiliki oleh Penulis.
- Muzammil. (2017). "Pembaharuan Pendidikan Islam Tradisionalis di Indonesia: Analisis Pemikiran Pendidikan K.H.A. Wahid Hasyim" dalam *EDURELIGIA*, Vol.01, No.01, hlm.102-121.
- Ni'mah, Z. (2015). "Revivalisme Pendidikan Islam Awal Abad 20: Studi Kritis Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif K.H. Ahmad Dahlan" dalam *AT-TAJDID: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Volume 4(1), hlm.14-15.
- Nisa, Khoirun & Chusnul Chotimah. (2020). "Pengembangan Kurikulum Pondok Pesantren" dalam *INOVATIF*, Vol.6, No.1 [Pebruari], hlm.45-68.
- Nurdholt, Henk Schulte et al. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia], Terjemahan.
- Nurhabibah. (2018). "Pemikiran Wahid Hasyim tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Dunia Modern" dalam *LITERASI*, Vol.IX, No.1, hlm.13-18.
- Nurfadilah, Asifa. (2019). "Madrasah Nizamiyah: Peranan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng (1934-1953)". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Paisun. (2018). "Analisis terhadap Pemikiran Wahid Hasyim tentang Pembaruan Pendidikan Pesantren" dalam *PIK*, Vol.1, No.1 [Maret], hlm.110-134.
- Pirol, Abdul. (2017). *Dinamika Pemikiran Islam Modern*. Palopo, Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar

- Perubahan, edisi revisi, cetakan ke-1. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/download/pdf/211228719.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Pranoto, Suhartono W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Priyatmoko, Sigit. (2018). "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era 4.0" dalam *TALIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol.1, No.2 [Juli], hlm.1-19. Available online also at: <https://media.neliti.com/media/publications/264718-memperkuat-eksistensi-pendidikan-islam-d-fbaf226e.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Priyadi, S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Puspitasari, Nindia. (2017). "Pendidikan Karakter Perspektif Islam: Studi Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim" dalam *AT-TAJID*, Vol.1, No.1 [Januari-Juni], hlm.105-123.
- Putri, Titin Apriani, M. Syaiful & Suparman Arif. (2019). "Propaganda Jepang dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan di Indonesia, Tahun 1942-1945". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Tersedia dan ada dimiliki oleh Penulis.
- Qomar, M. (2005). *Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahman, Arif. (2016). "Reformasi dan Arah Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia" dalam *LITERASI*, Vol.VII, No.2 [Desember], hlm.75-88.
- Redaksi Tempo. (2017). *Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebuireng*. Jakarta: Penerbit KPG [Kepustakaan Populer Gramedia].
- Reksiana. (2018). "Diskursus Terminologi Model, Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.XV, No.2 [Desember], hlm.199-225.
- Rifai, M. (2014). *Wahid Hasyim: Biografi Singkat, 1914-1953*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group.
- Rohmah, Siti Nur. (2018/2019). "Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN [Universitas Islam Negeri] Raden Intan Lampung. Available online also at: <http://repository.radenintan.ac.id/4397/1/SKIPSI%20SITI%20NUR%20ROHMAH.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Januari 2020].
- Rusdyiyah, Evi Fatimatur. (2017). "Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa K.H.A Wahid Hasyim" dalam *AL-IBROH*, Vol.2, No.1 [Mei], hlm.1-31.
- Sa'adillah, Rangga. (2015). "Pendidikan Karakter Menurut K.H. Wahid Hasyim" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, No.2 [November], hlm.277-303.
- Salim. (2016). "Lektur Modern Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia" dalam *MIQOT*, Vol.XL, No.1 [Januari-Juni], hlm.66-87. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/157901-ID-lektur-moderen-sejarah-pendidikan-islam.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Santoso, Moh Hadi & Sumarno. (2015). "Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim" dalam *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.3, No.3 [Oktober]. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/reader/230695058> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Maret 2019].
- Saridjo, M. (1998). *Bunga Rampai Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia].
- Shafer, R.J. (1974). *A Guide to Historical Method*. Illinois: The Dorsey Press.
- Sholikhudin, M. Anang. (2016). "Politik Pendidikan Islam Masa Modern: Membaca Gagasan Tokoh Pembaharu di Negara Turki, India, dan Mesir" dalam *AL-MURABBI*, Vol.1, No.1, hlm.141-160. Tersedia secara online juga di: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=899085&val=14142&title=POLITIK> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Solahudin, M. (2013). *Nakhoda Nahdliyyin: Biografi Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sejak 1926 hingga Sekarang*. Kediri: Nous Pustaka Utama.
- Syaifullah. (2017). "Analisis Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di MA Plus Pondok Pesantren Abū Hurayrah Mataram". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Mataram, NTB [Nusa Tenggara Barat]: Pascasarjana Iain [Institut Agama Islam Negeri] Mataram. Tersedia secara online juga di: <http://etheses.uinmataram.ac.id/476/1/Syaifullah%20154141012.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Maret 2019].
- Steenbrink, K. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Terjemahan.
- Suryanegara, A.M. (1996). *Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca, Pangalengan, Bandung Selatan*. Jakarta: Yayasan Wira Patria Mandiri.
- Suryanegara, A.M. (1998). *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Suryanto, Bowo. (2016). "Peran K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Islam di Indonesia Tahun 1935-1953". *Artikel Ilmiah Tidak*

- Diterbitkan.* Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI [Persatuan Guru Republik Indonesia] Yogyakarta. Tersedia secara online juga di: <http://repository.upy.ac.id/1189/1/Artikel.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Maret 2019].
- Suwirta, Andi. (1989). "Ketika Saudara Tua Disambut oleh Saudara Muda: Sikap Politik Pemerintahan Pendudukan Jepang terhadap Umat Islam Indonesia, 1942-1945". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan.* Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Bandung.
- Syafe'i, Imam. (2017). "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter" dalam *Al-TADZKIYYAH: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.1, hlm.61-82.
- Syahriman, Agung & Agus Mulyana. (2019). "Peranan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Pemerintahan Indonesia, Tahun 1945-1953" dalam *FACTUM*, Vol.8, N0.1 [April], hlm.15-32.
- Syaiful, Ach. (2019). "Konsep Pendidikan Islam K.H.A. Wahid Hasyim" dalam *KARIMAN*, Vol.07, No.01 [Juni], hlm.1-16.
- Syarif, M. (2019). "Politik Pendidikan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan.* Mojokerto, Jawa Timur: FAI UIM [Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Majapahit].
- Tampubolon, Ichwansyah. (2014). "Orientasi dan Corak Pembaruan dalam Islam: Kajian terhadap Respons Masyarakat Islam" dalam *MADANIA*, Vol. XVIII, No.1 [Juni], hlm.13-34.
- Teguh, Irfan. (2019). "Mula dan Akhir Perjalanan K.H.A. Wahid Hasjim" dalam *TIRTO.ID*, pada 19 April. Tersedia secara online pula di: <https://tirto.id/mula-dan-akhir-perjalanan-kh-a-wahid-hasjim-dmHS> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Januari 2020].
- Tesdy, I., W. Darmawan & A.B. Santosa. (2018). "Dari Tradisional ke Modern: K.H. Hidayat Ruhiyat Sirodj dan Pesantren Albidayah Tahun 1971-2011" dalam *FACTUM*, Volume 7(2), hlm.189-198.
- Ustman, Hasan. (1986). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Penerbit Kemenag RI [Kementerian Agama Republik Indonesia], terjemahan A. Muin Umar et al.
- Wahid, S. (2000). *Meneladani Eyang Wahid*. Jakarta: Yayasan Bina Buana.
- Yahya, Ali. (2007). *Sama Tapi Berbeda: Potret Keluarga Besar K.H.A. Wahid Hasyim*. Jombang: Yayasan K.H.A. Wahid Hasyim.
- Yudhyarta, Deddy Yusuf. (2013). "Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Telaah Kritis Pemikiran Harun Nasution". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan.* Pekanbaru, Riau: PPs UIN [Program Pasca Sarjana, Univeritas Islam Negeri] Sultan Syarif Kasim. Tersedia secara online juga di: http://repository.uin-suska.ac.id/2576/1/2013_2013100PAI.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 11 Maret 2019].
- Zaini, A. (1998). "Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educational Reform and to Indonesian Nationalism during the Twentieth Century". *Unpublished Master Thesis*. Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Zuhdiyah. (2015). "Respon Yayasan Pesantren terhadap Globalisasi: Studi Kasus Yayasan Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur" dalam *TADRIB*, Vol.1, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/reader/267946394> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2019].



Abdul Wahid Hasyim dan Pesantren Tebuireng di Jombang

(Sumber: <https://intisari.grid.id> and <https://www.tribunnewswiki.com>, 15/1/2020)

K.H. (Kyai Haji) Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Desa Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari, tidak pernah menyekolahkan Abdul Wahid Hasyim ke HIS (*Hollandsche Inlandsche School*), Sekolah Dasar milik pemerintah kolonial Belanda, seperti halnya anak-anak tokoh masyarakat pada masa itu. Hal ini dikarenakan, K.H. Hasyim Asy'ari dikenal anti-sekolah yang didirikan oleh pihak penjajah.